

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

FIRNANDA WIRAYUDHA
NPP. 31.0539

*Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: yudhaipdn31@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Karno, S.Kom, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The main problem is the low realization of village budgets due to a lack of transparency in village governance. SIAP Desa is an innovation to improve the transparency and efficiency of village governance in Bojonegoro Regency. **Purpose:** This study aims to determine the application of the Village SIAP Application in improving government transparency in Bojonegoro Regency. **Method:** This research uses a qualitative data analysis method with data collection through observation, interviews and documentation. The collected data was then analyzed through the process of data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Result:** The implementation of the SIAP Desa application by DPMD Bojonegoro Regency is still not optimal, although it has improved the transparency and efficiency of village governance with the main challenges related to data input focus, community awareness and less supportive infrastructure. **Conclusion:** The implementation of the SIAP Desa application by DPMD Bojonegoro Regency is still not optimal, although it has improved the transparency and efficiency of village governance with the main challenges related to data input focus, community awareness and less supportive infrastructure. However, efforts have been made to improve these barriers through socialization, rewarding active operators and improving infrastructure. **Keywords:** information system application, village government administration, government transparency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama menunjukkan rendahnya realisasi anggaran desa yang disebabkan karena kurangnya keterbukaan pemerintahan di desa. SIAP Desa merupakan inovasi yang hadir untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Aplikasi SIAP Desa dalam meningkatkan keterbukaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penerapan Aplikasi SIAP Desa oleh DPMD Kabupaten Bojonegoro masih belum maksimal, meskipun telah meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan desa dengan tantangan utama terkait fokus input data, kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang kurang mendukung. **Kesimpulan:** Penerapan Aplikasi SIAP Desa oleh DPMD Kabupaten Bojonegoro masih belum maksimal, meskipun telah

meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan desa dengan tantangan utama terkait fokus input data, kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang kurang mendukung. Namun, upaya telah dilakukan dalam memperbaiki hambatan tersebut melalui sosialisasi, penghargaan kepada operator aktif dan peningkatan sarana-prasarana.

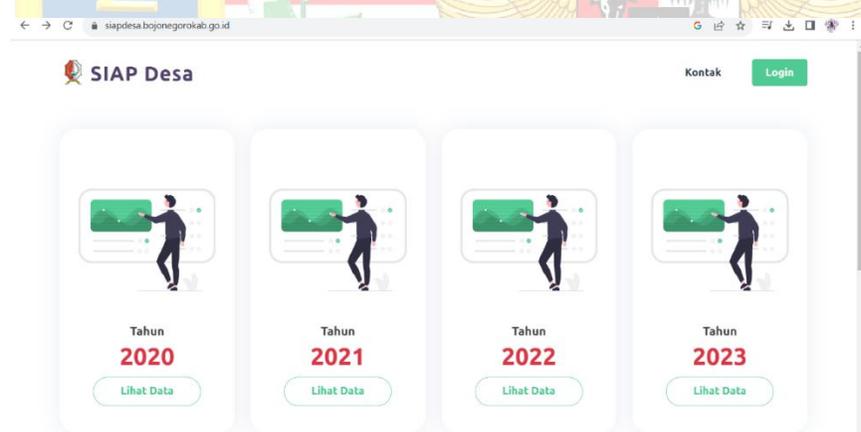
Kata kunci: aplikasi sistem informasi, administrasi pemerintahan desa, keterbukaan pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap pemerintahan di tingkat desa di seluruh Indonesia melalui konsep *e-government*. Hal ini memungkinkan peningkatan akses informasi, layanan publik yang lebih baik dan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan (Indrawan et al., 2021). Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi juga telah meluas ke pemerintahan desa, menjadikan administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan secara digital, sehingga penggunaan dana desa lebih transparan serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah merealisasikan teknologi dalam sektor pemerintahan desa untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023 dengan mengembangkan Aplikasi SIAP Desa. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dengan tujuan sebagai sumber informasi terbuka bagi masyarakat secara umum serta memungkinkan akses dan pemanfaatan data yang transparan dan bermanfaat bagi perkembangan desa serta masyarakat. SIAP Desa mengintegrasikan data secara real-time dengan Siskeudes untuk pengawasan anggaran dan realisasi APBDesa. SIAP Desa juga menyajikan profil pemerintahan desa dan memfasilitasi pengarsipan data administrasi desa dalam bentuk digital.



Gambar 1.1 Tampilan Awal SIAP Desa

Sumber: <https://siapdesa.bojonegorokab.go.id/web>

Aplikasi SIAP Desa berperan sebagai jembatan digital antara pemerintah dan masyarakat memberikan akses informasi yang luas dan real-time terkait dengan berbagai aspek pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses data tentang Indeks Desa Membangun, realisasi APBDesa, proses penyaluran dana ke desa, daftar kepala desa, BPD, perangkat desa, serta produk hukum desa. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah Bojonegoro, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap

perkembangan desa dari tahun ke tahun. Penerapan SIAP Desa dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang dari penerapan aplikasi SIAP Desa di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi pemerintahan. Keterbukaan informasi menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia yang harus diberikan oleh pemerintah (Suhendar et al., 2008). Terkadang ada beberapa informasi yang sebenarnya masyarakat mempunyai hak untuk mengetahuinya, tetapi pemerintah tidak memberikan hak tersebut dengan alasan yang ada, khususnya bagi masyarakat desa. Memang sudah semestinya masyarakat juga ikut serta dalam urusan pemerintahan untuk memantau proses pemerintahan yang berjalan karena salah satu tujuan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, terkadang hal tersebut masih sering dinilai sebelah mata dan hal yang dinilai penting hanya hasil dari proses tersebut yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diluncurkan aplikasi SIAP Desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai sebuah terobosan inovatif berbasis online yang memiliki beberapa komponen inti. Aplikasi ini menjadi jembatan digital antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi dalam skala besar, tanpa memandang jarak atau waktu. Aplikasi SIAP Desa memungkinkan Masyarakat mengakses informasi terkini mengenai Informasi mengenai data Indeks Desa Membangun, Proses dan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, realisasi APBDes 419 Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 419 Desa, Menampilkan 10 Desa teratas dan terbawah inputing realisasi anggaran dari 419 Desa, proses penyaluran dana ke Desa, daftar nama Kepala Desa, BPD serta Perangkat Desa dan Menampilkan daftar Perdes, Perkades dan SK 419. Sehingga pemanfaatan data ini tidak hanya terbatas pada penggunaan internal antar instansi pemerintah, tetapi juga akan tersedia untuk masyarakat secara umum. Hal ini akan memungkinkan akses dan pemanfaatan data yang lebih transparan, terbuka, dan bermanfaat bagi perkembangan desa dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun persoalan mengenai keterbukaan informasi pemerintahan yang kurang sudah dapat terselesaikan dengan aplikasi ini, tetapi muncul persoalan baru yaitu rendahnya input data dalam aplikasi sistem administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023, yang menghasilkan ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi dan menghambat keterbukaan pemerintahan. Sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat 10 desa dengan top realisasi anggaran desa terendah. Situasi ini menjadi titik perhatian yang mendalam karena seharusnya desa tersebut tidak mengalami gangguan pada bidang teknologi. Permasalahan tersebut mungkin muncul karena beberapa desa menghadapi kesulitan dalam melaksanakan input data ke dalam Aplikasi SIAP Desa atau mungkin ada masalah administrasi lainnya. Penyebab dari rendahnya angka ini perlu diklarifikasi dimana hambatan yang ada dalam penerapan aplikasi tersebut. Ketika input data yang dimasukkan ke dalam sistem administrasi pemerintahan desa tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, hal ini dapat mengurangi akurasi dan keandalan data yang tersedia untuk publik. Dampaknya adalah kurangnya informasi yang tepat dan lengkap untuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang ingin memantau dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar permasalahan ini guna meningkatkan efektivitas aplikasi tersebut dalam upaya meningkatkan keterbukaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, mendorong partisipasi aktif, tanggapan, dan pemantauan oleh Masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu khususnya mengenai penerapan sistem informasi pemerintahan desa baik berupa website, maupun aplikasi. Penelitian Diana Hertati berjudul *Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo* (Diana Hertati, 2020), menemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan, kedua desa tersebut telah mengadopsi aplikasi Siskeudes, yang tersedia dalam mode online maupun offline. Aplikasi ini menonjol karena antarmukanya yang mudah digunakan dan didukung dengan panduan implementasi serta manual penggunaan. Ini diambil dengan mempertimbangkan variasi kemampuan pengguna di kedua desa.

Penelitian Arta Rusidarma Putra dan Silfiana berjudul *Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang* (Arta dan Silfiana, 2022), menemukan bahwa Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum mencapai tingkat optimal karena terdapat masalah dalam koordinasi yang mengakibatkan ketidakberhasilan penerapannya.

Penelitian Muthmainna Ahmad berjudul *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang* (Ahmad, 2019), menemukan bahwa penerapan sistem informasi desa di Desa Mata Allo, Kabupaten Enrekang, perlu perbaikan. Diperlukan peningkatan ketepatan waktu dalam pelayanan dan disiplin staf kantor desa. Pengendalian biaya perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pengadaan perangkat komputer, jaringan internet, dan pembuatan website desa. Selain itu, perlu lebih mengembangkan ketepatan sasaran dalam pelayanan publik, transparansi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian Aziz Nandana Sumarno dan Suranto yang berjudul *Efektivitas Sistem Informasi Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa Mandong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Sumarno dan Suranto, 2020), menemukan bahwa Kapasitas atau daya tampung website desa saat ini dianggap terbatas, sehingga dikhawatirkan hal ini dapat menghambat proses penginputan data terbaru, termasuk data kependudukan dan administrasi lainnya, di masa yang akan datang.

Penelitian Elsa Prisanda dan Rury Febrina berjudul *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi Sispedal dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance* (Prisanda, E., dkk, 2021), menemukan bahwa penerapan aplikasi SISPEDAL di pemerintah desa Aliantan telah memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian Rahimi Fitri, Arifin Asyikin dan Agus Budi N berjudul *Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan Instalasi Voice Server* (Fitri, R. dkk, 2019), menemukan bahwa Implementasi SID dan server suara meningkatkan tata kelola dan partisipasi masyarakat Desa Bamban Selatan.

Penelitian Aqil Fathani, Ulung Pribadi, Cindy Suling dan Novia Azmi berjudul *Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik* (Fathani, A. Dkk, 2022), menemukan bahwa kualitas informasi adalah indikator terendah dalam keberhasilan SID dan Desa Dlingo merupakan desa terbaik dalam menerapkan SID.

Penelitian Arkhan Subari, Heru Winarno dan Saiful Manan berjudul *Penerapan Sistem Informasi Warga Berbasis Web di Desa Kangkung* (Subari, A. Dkk, 2021), menemukan bahwa sistem informasi warga berbasis web membantu meningkatkan aksesibilitas dan akurasi data populasi dan sistem ini membantu melayani warga Desa Kangkung dengan data yang cepat, akurat dan terbaharui.

Penelitian Tuti Hermelina, Afriansyah Berlian dan Meriana berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM* (Hermelina, T. Dkk, 2021), menemukan bahwa sistem informasi akuntansi, IT dan SDM berdampak pada kinerja karyawan BUM Desa. Kemudian pelatihan, monitoring dan komitmen membantu meningkatkan kinerja karyawan BUM Desa.

Penelitian Abdiansah, Alvi Syahrini Utami, Novi Yusliani, Kanda Januar Miraswan, Ahmad Fali Oklilas berjudul *Penerapan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan* (Abdiansah, dkk, 2021), menemukan bahwa pelatihan *OpenSID* meningkatkan administrasi desa dan layanan informasi. Manfaat yang diberikan oleh aplikasi ini adalah dukungan teknis dan keamanan data serta *Open SID* adalah alternatif untuk *SideKa* untuk sistem informasi desa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian ini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Persamaan studi yang diangkat mengenai penerapan sistem informasi dalam administrasi atau pemerintahan di desa oleh penelitian terdahulu memberikan manfaat yang berharga dengan riset yang beragam. Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dengan membandingkan penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi perbedaan tersebut yakni lokus penelitian dan pelaksana dari aplikasi yang diteliti dimana penelitian terdahulu fokus meneliti di desa-desa, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. Penulis dapat mengambil pelajaran dari penelitian sebelumnya untuk mengarahkan penelitian ini ke arah yang lebih eksploratif dan mendalam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan aplikasi SIAP Desa dalam keterbukaan informasi pemerintahan di Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung aplikasi *Siap Desa* dalam keterbukaan informasi pemerintahan di Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. Mengetahui upaya yang dilaksanakan Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendalami kompleksitas fenomena yang diteliti dengan mendekati subjek penelitian secara mendalam, menggali pemahaman yang mendalam tentang nilai, pandangan, dan pengalaman individu. Metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis narasi dan wawancara guna memahami terkait topik penelitian untuk menggali makna-makna yang mungkin tersembunyi dalam data kualitatif, dan akhirnya, menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber wawasan yang berharga terkait masalah yang diteliti (Abdussamad, 2021). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 informan yang terdiri dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 4 orang admin pengelola aplikasi *SIAP Desa* dan 3 orang masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, penulis melakukan observasi partisipatif moderat dengan terlibat dalam kegiatan terkait penerapan aplikasi *SIAP Desa* bersama narasumber kegiatan. Kemudian untuk analisis data, penulis memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman, dimana melalui empat proses mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Harahap & Angelia, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan aplikasi *SIAP Desa* menggunakan Teori Penerapan oleh Maskun dalam labolo mempunyai 5 dimensi, yaitu berorientasi pada kebijaksanaan, berorientasi pada lingkungan, berorientasi pada kemajuan teknologi, berorientasi pada legislasi, berorientasi pada organisasi, administrasi dan manajemen. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penerapan Aplikasi SIAP Desa Pada 5 Dimensi

3.1.1. Penerapan Aplikasi SIAP Desa yang Berorientasi Pada Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro memiliki visi untuk menjadi sumber ekonomi kerakyatan dan budaya lokal, serta mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta program unggulan Bojonegoro Green dan Smart City merupakan bagian dari RPJMD 2018-2023. Dinas DPMD Bojonegoro bertanggung jawab untuk menerapkan misi tersebut, termasuk penerapan SIAP Desa untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan menuju smart city. DPMD telah mengadakan bimbingan teknis bagi operator desa dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan turun langsung ke desa. Hal ini menunjukkan komitmen DPMD dalam menyebarkan penerapan SIAP Desa kepada masyarakat Bojonegoro secara luas.

3.1.2. Penerapan Aplikasi SIAP Desa yang Berorientasi Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Faktor lingkungan geografis dan sosial kultural di Bojonegoro mempengaruhi penerapan SIAP Desa. Wilayah subur dengan mata pencaharian utama sebagai petani mencirikan masyarakat. Meskipun sudah ada sosialisasi, masih ada kesenjangan pemahaman, terutama di kalangan petani. Diperlukan upaya sosialisasi lebih menyeluruh untuk mengakomodasi kebutuhan khusus masyarakat petani. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa SIAP Desa memberikan manfaat efisien dalam biaya, waktu, dan tenaga. Meskipun belum semua masyarakat mengetahui SIAP Desa, aplikasi ini telah membawa dampak positif dalam memperbaiki layanan publik yang efisien.

baik karena sebuah keberhasilan berasal dari partisipasi masyarakat.

Para pemuda juga harus mampu mendorong seluruh pihak termasuk orang tua di lorong untuk ikut aktif di taman baca bahkan saling berbagi tugas untuk bergantian membacakan buku-buku cerita kepada anak-anak. Apalagi program ini diintegrasikan dengan program Kotaku, program Bank Sampah, serta Program Karang Taruna, sehingga menjadi satu kesatuan agar lingkungan semakin baik dan menciptakan ketentraman dalam bingkai kebersamaan.

3.1.3. Penerapan Aplikasi SIAP Desa yang Berorientasi Pada Teknologi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah meningkatkan kualitas jaringan internet dengan bekerja sama dengan beberapa penyedia layanan internet. Meskipun sinyal 4G telah tersedia di sebagian besar wilayah dengan kecepatan yang baik, masih ada kendala dalam penyebaran yang merata dan stabilitas sinyal. Ini menunjukkan kemajuan infrastruktur jaringan internet, tetapi diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan dan stabilitas jaringan di seluruh wilayah guna mendukung optimalisasi program seperti SIAP Desa. Tantangan terkait penyebaran sinyal yang tidak merata menyebabkan ketidakstabilan kecepatan data di beberapa area. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan operator telekomunikasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan penggunaan aplikasi SIAP Desa. Meskipun sarana dan prasarana telah disediakan, perbaikan infrastruktur jaringan masih diperlukan agar aplikasi dapat digunakan secara optimal di seluruh daerah Bojonegoro

3.1.4. Penerapan Aplikasi SIAP Desa yang Berorientasi Pada Legislasi

SIAP Desa di Kabupaten Bojonegoro mengikuti Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Aplikasi ini terintegrasi dengan Siskeudes dan Indeks Desa Membangun untuk pengumpulan

data. Operator desa dapat mengakses panduan sesuai regulasi melalui SOP yang terintegrasi dalam aplikasi, memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan data administrasi desa. Ini menunjukkan bahwa SIAP Desa telah dirancang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan data administrasi desa.

3.1.5. Penerapan Aplikasi SIAP Desa yang Berorientasi Pada Organisasi, Administrasi dan Manajemen

Penerapan aplikasi SIAP Desa di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan tata kelola dana desa dan kinerja administrasi pemerintahan. Hasil rapat MCP menunjukkan kontribusi besar SIAP Desa dalam peningkatan nilai MCP, serta perubahan efisien dan terstruktur dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi publikasi APBDes dan perencanaan desa melalui aplikasi ini, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Secara keseluruhan, pelaksanaan SIAP Desa membuktikan perannya yang penting dalam meningkatkan tata kelola dana desa dan kinerja administrasi pemerintahan.

3.2. Hambatan Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Desa oleh DPMD Maupun Pemerintahan Desa

Penerapan SIAP Desa di Kabupaten Bojonegoro menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kurangnya fokus dalam input data oleh operator desa menyebabkan ketidakakuratan informasi dalam sistem. Wawancara dengan operator desa menunjukkan bahwa terbatasnya waktu dan sumber daya menyebabkan kesulitan dalam memprioritaskan pembaruan data. Kedua, banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang SIAP Desa menghambat partisipasi mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang SIAP Desa telah menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan penggunaan aktif. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, terutama ketersediaan sinyal yang tidak merata di seluruh wilayah, juga menjadi kendala. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan akses data, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, fokus operator desa dalam input data, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung efektivitas penerapan SIAP Desa.

3.3. Upaya yang Dilaksanakan Dalam Memperbaiki Hambatan Penerapan SIAP Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro merencanakan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SIAP Desa. Pertama, mereka akan memberikan penghargaan dan teguran kepada operator desa yang konsisten atau kurang fokus dalam input data, serta menyelenggarakan pelatihan khusus bagi mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan operator desa dalam memperbaiki data dengan efektif. Kedua, DPMD akan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang manfaat dan penggunaan aplikasi SIAP Desa melalui berbagai kanal, seperti pertemuan di tingkat desa dan media sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan SIAP Desa. Ketiga, DPMD akan melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan sinyal telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Langkah-langkah konkret termasuk peningkatan infrastruktur jaringan, pemasangan tower baru, dan peningkatan kualitas layanan internet, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan demikian, DPMD berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIAP Desa dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh warga desa.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tujuan dari penerapan aplikasi SIAP Desa adalah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. Ternyata tujuan dari aplikasi ini masih belum tercapai karena masih ditemukan desa dengan realisasi anggaran rendah pada tahun 2023, dalam hal ini peneliti menemukan 10 desa dengan top realisasi anggaran desa terendah yang lokasinya rata-rata dekat dengan pusat Kabupaten Bojonegoro. Seharusnya desa tersebut tidak mengalami gangguan pada bidang teknologi karena bisa dikatakan tidak terletak di pedalaman dan akses internet lancar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penyebab permasalahan itu muncul karena kesulitan dalam pelaksanaan input data ke dalam aplikasi SIAP Desa dan faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan aplikasi ini. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi dan menghambat keterbukaan pemerintah. Ketika input data yang dimasukkan ke dalam SIAP Desa tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, hal ini dapat mengurangi akurasi dan keandalan data yang tersedia untuk publik. Dampaknya adalah kurangnya informasi yang tepat dan lengkap untuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang ingin memantau dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa, khususnya masalah keuangan desa, apabila informasi yang disediakan pemerintah tidak lengkap, maka akan memunculkan tanda tanya di masyarakat mengenai pengalokasian dana apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dana yang didapat dan realisasinya.

Sama halnya dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Diana Hertati (Hertati, D., 2020) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi aplikasi Siskeudes yang tersedia online maupun offline dengan kelebihan desain tampilan dan pengoperasiannya yang mudah digunakan dan didukung dengan panduan implementasi. Perbedaannya di Kabupaten Sidoarjo, desa-desa tersebut sudah mampu mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan aplikasi ini bisa dikatakan telah sukses dalam pengimplementasiannya.

Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggungjawab aplikasi ini perlu memikirkan upaya untuk memperbaiki hambatan yang ditemukan dari penerapan aplikasi SIAP Desa di desa-desa di Kabupaten Bojonegoro.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya efektif dalam pelatihan operator dan sosialisasi kepada masyarakat, serta komitmen terhadap kemajuan teknologi melalui penyediaan infrastruktur, penerapan SIAP Desa masih belum maksimal. Meski berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan desa, terdapat hambatan seperti kurangnya fokus input data oleh perangkat desa, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap SIAP Desa, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. DPMD Bojonegoro telah merespon dengan melakukan sosialisasi, memberikan penghargaan kepada operator aktif, teguran kepada yang kurang aktif, serta meningkatkan sarana dan prasarana, terutama dalam masalah jaringan, sebagai upaya memperbaiki hambatan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu aplikasi terkait saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan aplikasi SIAP Desa dalam meningkatkan keterbukaan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh masyarakat dan pihak yang membantu dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansah, A., Utami, A. S., Yusliani, N., Miraswan, K. J., & Oklilas, A. F. (2021). Penerapan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1472-1479.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621>
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Fathani, A. T., Pribadi, U., Suling, C. F., & Azmi, N. A. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 10(1), 92-97.
<http://dx.doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347>
- Fitri, R., Subandi, S., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2019). Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Baman Selatan Dalam Membangun Desa. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 1(2), 81-91.
<https://doi.org/10.31961/impact.v1i2.625>
- Harahap, A. S., & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 29-42.
<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/884>
- Hermalinda, T., Afriansyah, B., & Meriana, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Rejang Lebong). *Akuisisi*, 17(2), 141-152.
<10.24127/akuisisi.v17i2.603>
- Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 236-248.
<https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610>
- Indrawan, J., Pratomo, R. R., & Ilmar, A. (2021). INOVASI PENDANAAN EVillage DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUWANGI.
<https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.217>
- Muthmainna Ahmat. (2019). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar*.
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 155-171.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.723>
- Putra, A. R., & Silfiana, S. (2022). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 67-78.

<https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.172>

Subari, A., Winarno, H., & Manan, S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Warga Berbasis Web Menggunakan Opensid Di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1), 34-37.

<https://doi.org/10.14710/jpv.2021.11175>

Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.

Sumarno, A. N. EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(3), 357-369.

<https://doi.org/10.20961/respublica.v4i3.58435>

